



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 02 April 2020

Halaman: 2

Hasil Reses Terancam Muspra

JOGJA, Radar Jogja – Hasil reses legislator di DPRD Kota Jogja, selama ini terancam muspra. Seiring dengan gagalnya penetapan hasil kerja pansus pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Jogja, dalam rapat paripurna, Senin (30/3) sore. Alasan fokus untuk penanganan korona dinilai juga tidak tepat.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Jogja Susanto Dwi Antoro menyebut, untuk penanganan korona di Kota Jogja, sudah disepakati untuk menggunakan dana tak terduga, sebesar Rp 2,84 miliar. Serta pengalihan anggaran kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Jogja, sebesar Rp 5 miliar. "Kalau untuk penanganan korona sudah ada anggaran tersendiri," katanya dalam jumpa pers, kemarin (1/4).

Toro, yang juga Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja itu menambahkan, sebenarnya pokir juga baru akan direalisasikan dalam APBD 2021. Untuk pergeseran anggaran dalam APBD 2020 ini pun juga sudah menyesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah. "Untuk korona sudah ada anggaran tersendiri, pokir tidak mengganggu itu," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti menyebut, ketidakhadiran semua anggotanya dalam rapat Senin (30/3) sore, karena menilai pansus pokir, yang lampirannya sampai lebih dari 2.700 kegiatan, jika dipaksakan semua harus masuk sebagai lampiran untuk diakomodasi dalam APBD 2021 momentumnya tidak tepat.

Sedang Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jogja Dedi Jati Setiawan menambahkan, dengan gagalnya digelar rapat pada Senin sore lalu berdampak pada terancamnya program prioritas di masyarakat. Menurut dia, dalam penyusunan pokir melibatkan aspirasi masyarakat saat reses. "Sekarang kami malu ketemu masyarakat, kalau ditanya kapan realisasi aspirasi saat reses lalu, mau jawab apa, wong rapurnya batal," keluhnya.

Selain itu, FPDIP juga mengusulkan sekitar 1.600 pokir dari total sekitar 2.700 pokir DPRD Kota Jogja. Dia menjelaskan, pokir yang dihimpun dari masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur.

Dedi mencontohkan, beberapa aspirasi masyarakat yang sudah dihimpun dalam pokir DPRD Kota Jogja, semisal dalam infrastruktur. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja itu menyebut, seperti untuk renovasi talut yang rusak. "Masyarakat sudah meminta segera diperbaiki, kami tamping sebisa yang bisa diperbaiki Pemkot, tapi ya semuanya terancam batal karena gagal disahkan saat rapat," ujarnya.

Dengan gagalnya pengesahan dalam rapat, kini FPDIP akan memfokuskan pengawalan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Jogja, yang direncanakan dimulai 7 April nanti. Juga dalam rapat kerja dengan OPD terkait. (pra/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005